

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis</p> <p>Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Tujuan kegiatan :</p>	<p>- Jumlah ASN Kota Padang Panjang per 28 Februari 2021 sebanyak 2.005 orang yang terdiri dari 1.232 orang berjenis kelamin perempuan dan 773 orang berjenis kelamin laki-laki.</p> <p>- Jumlah PNS Gol.I sebanyak 16 orang, Gol.II 338 orang, Gol III 1.265 orang dan Gol IV 386 orang</p> <p>- Jumlah PNS berusia <30 adalah sebanyak 102 PNS, 30-40 sebanyak 713 PNS, 40-50 sebanyak 633 PNS dan >50 sebanyak 557 PNS.</p> <p>- Seluruh OPD memiliki anggaran bagi ASN untuk mengikuti bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi, namun</p>	<p>Akses:</p> <p>- Kurangnya kesempatan bagi PNS untuk mengikuti diklat / bimtek karena keterbatasan anggaran dan kesibukan pekerjaan</p> <p>Partisipasi:</p> <p>- Rendahnya partisipasi dan kemauan dari ASN untuk mengikuti diklat / bimtek</p> <p>- Tawaran diklat yang jarang direspon oleh ASN</p> <p>- Tingginya jumlah PNS yang berusia diatas 50 tahun menyebabkan minat untuk mengikuti diklat sangat rendah</p> <p>Kontrol :</p> <p>- Belum seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen dan kemauan untuk</p>	<p>- Terbatasnya anggaran / kuota peserta yang disediakan untuk melaksanakan atau mengirim peserta diklat/bimtek</p>	<p>- Masih rendahnya komitmen dari pimpinan OPD atau pimpinan daerah dalam peningkatan kompetensi dan pengetahuan ASN</p> <p>- Terbatasnya kegiatan diklat / bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel dan berkompeten.</p> <p>- Materi diklat / bimtek yang terbatas dan tidak mendukung pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Tupoksi ASN</p> <p>- Jadwal dan jangka waktu</p>	<p>meningkatnya kinerja ASN</p>	<p>- Diklat Pengelola Kearsipan</p> <p>- Diklat PPK SKPD</p> <p>- Pengajuan kebijakan alokasi anggaran minimal untuk peningkatan kapasitas aparatur.</p>	<p>- Belum seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen dan kemauan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan ASN</p> <p>-Belum seluruh OPD / ASN dapat menikmati peningkatan pengetahuan dan keterampilan karena keterbatasan anggaran</p> <p>-Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 dinyatakan bahwa setiap ASN minimal setiap tahunnya mengikuti 20 jam pelajaran diklat / bimtek.</p>	<p>Kegiatan 1: Diklat Pengelola Kearsipan Input : Rp 58.300.000,- Output: 40 orang PNS mengikuti diklat Pengelola Kearsipan Outcome: Meningkatnya kemampuan dan kompetensi ASN dalam mengelola arsip</p> <p>Kegiatan 2: Diklat PPK SKPD Input : Rp 46.600.000,- Output : 30 orang PNS mengikuti Diklat PPK SKPD</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Meningkatnya pemerataan kesempatan dalam peningkatan keterampilan dan profesionalisme ASN</p> <p>Output kegiatan : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme ASN</p>	<p>dengan jumlah dan kuota yang sangat terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> - BKPSDM memiliki program dan kegiatan terkait pelaksanaan diklat dan pengiriman peserta diklat, bimtek dan sosialisasi. - Belum seluruh ASN / OPD dapat menikmati pemanfaatan anggaran terkait diklat, bimtek dan sosialisasi yang tersedia di BKPSDM. - Adanya UU ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 yang mengatur masing-masing ASN minimal mendapatkan 20 Jam Pelajaran per tahun. 	<p>meningkatkan kompetensi dan pengetahuan ASN</p> <p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan materi diklat yang mendukung pelaksanaan tupoksi di OPD masing-masing - Banyak dampak negatif yang dirasakan ASN yang mengikuti kegiatan diklat seperti: pekerjaan yang terbengkalai. - Tidak adanya korelasi antara diklat yang diikuti dengan pengembangan karir ASN. 		<p>pelaksanaan diklat / bimtek yang terlalu panjang</p>				<p>Outcome: Meningkatnya kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas sebagai PPK SKPD</p>

Padang Panjang, Maret 2021
 Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
 BUDY SUARMAN, AP
 NIP. 19740918 199311 1 001